

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Nasir✉

Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: nasir@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol16No2.pp75-82>

ABSTRACT

Local government asset management is an important aspect in realizing accountable and transparent governance. However, in practice, asset management still faces various problems, such as administrative disorder, inaccurate data, and weak supervision. Along with the development of information technology, digital transformation is seen as a strategic solution to improve the quality of government asset management. This research aims to examine the implementation of digital transformation in government asset management at the Takalar Regency Regional Finance and Assets Agency and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of the regional asset management information system has improved administrative order, the quality of asset data, and the transparency and accountability of local government asset management. However, the implementation of digital transformation is not fully optimal because it is still faced with limited human resource competencies, work culture adaptation, and technology infrastructure support. Therefore, continuous efforts are needed to strengthen the capacity of apparatus, internal policies, and infrastructure to optimize the benefits of digital transformation in the management of local government assets.

Keyword: Digital Transformation, Asset Management, Local Government.

ABSTRAK

Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban administrasi, ketidakakuratan data, serta lemahnya pengawasan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transformasi digital dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan aset daerah telah meningkatkan ketertiban administrasi, kualitas data aset, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, adaptasi budaya kerja, serta dukungan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk

memperkuat kapasitas aparatur, kebijakan internal, dan infrastruktur guna mengoptimalkan manfaat transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Transformasi Digital, Pengelolaan Aset, Pemerintah Daerah.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik dipahami sebagai proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi, kualitas layanan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. (Millard, 2023) menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan menyeluruh yang mencakup proses kerja, struktur organisasi, dan budaya birokrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, transformasi digital menjadi instrumen strategis untuk menjawab tuntutan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan aset pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan. Menurut (Mardiasmo, 2021), pengelolaan aset pemerintah mencakup rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusan dan pengawasan aset. Aset pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penunjang operasional pemerintahan sekaligus sebagai sumber daya penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya *good governance*.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah (Zamdedy, 2024). Namun demikian, (Sarwar et al., 2023) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta komitmen organisasi dalam mengelola perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada

aspek teknologi, tetapi juga pada perubahan organisasi dan tata kelola.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Ketidaktertiban administrasi, ketidakakuratan dan ketidaksinkronan data aset, lemahnya pengawasan, serta rendahnya tingkat pemanfaatan aset secara optimal masih menjadi tantangan yang umum ditemui. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah, serta menghambat optimalisasi nilai aset sebagai sumber daya publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pengelolaan aset yang ideal dan praktik pengelolaan aset di lapangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital sebagai upaya perbaikan tata kelola aset. Pemanfaatan sistem pengelolaan aset berbasis digital memungkinkan proses pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset dilakukan secara lebih terintegrasi dan akurat. Transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk merespons tuntutan transformasi digital tersebut. Implementasi pengelolaan aset berbasis digital di BKAD Kabupaten Takalar diharapkan dapat mendukung tertib administrasi barang milik daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola aset pemerintah. Namun, proses transformasi digital di tingkat organisasi pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia,

adaptasi budaya kerja, serta kesesuaian regulasi dan kebijakan internal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah dilaksanakan pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di BKAD Kabupaten Takalar. Secara rasional, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi praktik transformasi digital yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan aset pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai proses transformasi digital pengelolaan aset pemerintah daerah serta menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah yang aplikatif dan kontekstual.

TINJAUAN PUSTAKA

Transformasi digital dalam sektor publik merupakan konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Millard, 2023) mendefinisikan transformasi digital sebagai proses pemanfaatan teknologi digital secara strategis untuk menciptakan nilai publik melalui perbaikan proses internal, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi prosedur

administratif, tetapi sebagai perubahan menyeluruh yang mencakup struktur organisasi, pola kerja, mekanisme pengambilan keputusan, dan budaya birokrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, transformasi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya publik secara lebih efektif dan akuntabel.

Salah satu sumber daya publik yang memiliki nilai strategis adalah aset pemerintah daerah. Pengelolaan aset pemerintah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan aset secara optimal, efisien, dan akuntabel. (Mardiasmo, 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan aset pemerintah mencakup serangkaian aktivitas yang sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pengawasan aset. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya mendukung tertib administrasi barang milik daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan nilai guna aset, efisiensi anggaran, serta penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, pengelolaan aset yang tidak tertib dan tidak terdokumentasi dengan baik berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, kehilangan aset, serta permasalahan akuntabilitas dan hukum.

Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan aset pemerintah diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset secara real time, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. (Zamdedy, 2024) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen aset mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah karena seluruh data aset tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi dan mudah ditelusuri. Dengan dukungan teknologi digital, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mengurangi duplikasi data, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pengelolaan aset pemerintah (Nur et al., 2024; Putri & Muis, 2025; Utari & Harahap, 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. (Sarwar et al., 2023) menegaskan bahwa faktor sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, serta dukungan kebijakan dan regulasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital di sektor publik. Kesiapan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital, tingkat literasi teknologi, komitmen pimpinan dalam mendorong perubahan, serta kesesuaian regulasi dengan praktik digital menjadi faktor kunci dalam mewujudkan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, transformasi digital berpotensi hanya menjadi perubahan teknis tanpa memberikan dampak substantif terhadap kualitas tata kelola.

Berbagai penelitian empiris telah mengkaji implementasi transformasi digital dan sistem informasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Zamdedy, 2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen aset memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Penelitian (Ndoka, De Rozari, & Kase, 2025) menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan aset mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur serta mempercepat proses penatausahaan aset, meskipun masih dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan organisasi. Sementara itu, (Rahmadi & Rusmiati, 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aspek teknologi, organisasi, dan regulasi, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik dalam perencanaan dan implementasinya.

Berdasarkan kajian teoretis dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Transformasi digital tidak hanya berperan sebagai alat teknis untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme perubahan tata kelola yang

berpotensi memperkuat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai praktik implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak transformasi digital terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, praktik, serta dinamika implementasi transformasi digital yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui perspektif para pelaku dan konteks organisasi.

Lokasi penelitian ditetapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset pemerintah daerah serta telah mulai menerapkan sistem informasi pengelolaan aset berbasis digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan ketersediaan informan.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah dan implementasi sistem digital, seperti pejabat struktural, pengelola aset, serta operator sistem informasi pengelolaan aset. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses transformasi digital pengelolaan aset.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman, serta pandangan aparatur terkait penerapan transformasi digital dalam pengelolaan

aset. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan aset berbasis digital, termasuk penggunaan sistem informasi dan pola kerja aparatur. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan aset, pedoman teknis, serta arsip lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan transformasi digital dan pengelolaan aset pemerintah. Proses analisis dilakukan secara interaktif hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar telah mulai menerapkan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah melalui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah. Sistem ini digunakan sebagai instrumen utama dalam mendukung seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan aset daerah. Penerapan sistem digital tersebut menandai pergeseran dari pola pengelolaan aset yang sebelumnya masih didominasi oleh prosedur manual menuju pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Digitalisasi pengelolaan aset memberikan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan

sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling dirasakan adalah kemudahan dalam mengakses data aset secara cepat dan terpusat. Aparatur tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau arsip manual yang tersebar, melainkan dapat memperoleh informasi aset melalui sistem digital yang tersimpan dalam satu basis data. Kondisi ini berdampak positif terhadap ketertiban administrasi aset serta mempermudah proses pengelolaan dan pengendalian aset daerah.

Dalam aspek administrasi aset, penggunaan sistem berbasis digital membantu aparatur dalam melakukan pencatatan aset secara lebih sistematis dan terstruktur. Setiap aset dicatat berdasarkan klasifikasi dan identitas yang jelas, sehingga memudahkan proses penelusuran dan pembaruan data aset. Data aset yang tersimpan dalam basis data terpusat juga memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital mampu meningkatkan ketepatan data aset serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan pencatatan dan duplikasi data yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.

Selain meningkatkan ketertiban administrasi, transformasi digital dalam pengelolaan aset di BKAD Kabupaten Takalar juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Informasi aset dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga mendukung proses pengawasan internal dan pelaporan kepada pimpinan. Sistem digital memungkinkan setiap perubahan data aset tercatat dengan baik, sehingga meningkatkan jejak audit dan memudahkan proses evaluasi pengelolaan aset. Dengan adanya sistem digital, proses penyusunan laporan aset menjadi lebih efisien, terdokumentasi secara sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital dalam pengelolaan aset belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala masih dihadapi, terutama yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital pengelolaan aset, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan

ketergantungan pada aparatur tertentu yang lebih menguasai teknologi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan agar seluruh aparatur dapat beradaptasi dengan sistem pengelolaan aset berbasis digital.

Selain faktor sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan pola kerja dari sistem manual ke sistem digital juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian aparatur masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan prosedur kerja yang baru, terutama dalam hal disiplin penginputan data dan pemanfaatan sistem secara konsisten. Perubahan budaya kerja ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menuntut perubahan sikap dan kebiasaan kerja aparatur.

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pimpinan dan kebijakan internal telah menjadi faktor pendorong dalam implementasi transformasi digital pengelolaan aset di BKAD Kabupaten Takalar. Komitmen pimpinan tercermin dalam upaya mendorong penggunaan sistem digital dalam pengelolaan aset. Namun demikian, masih diperlukan penguatan komitmen organisasi secara menyeluruh agar pemanfaatan sistem digital dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan jaringan pendukung, juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kelancaran pengelolaan aset berbasis digital. Keterbatasan infrastruktur pada kondisi tertentu dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar sejalan dengan konsep transformasi digital sektor publik yang menekankan pemanfaatan teknologi sebagai sarana peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini memperkuat pandangan (Millard, 2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai proses digitalisasi administrasi, melainkan sebagai upaya strategis

untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan kualitas tata kelola, serta menciptakan nilai publik. Dalam konteks ini, penerapan sistem informasi pengelolaan aset di BKAD Kabupaten Takalar dapat dipandang sebagai langkah awal menuju pembaruan tata kelola aset pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi.

Peningkatan ketertiban administrasi dan kualitas data aset yang ditemukan dalam penelitian ini mendukung teori pengelolaan aset pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2021), yang menekankan pentingnya pengelolaan aset yang tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan sistem informasi manajemen aset di BKAD Kabupaten Takalar terbukti mampu memperbaiki proses penatausahaan aset, khususnya dalam hal pencatatan, pembaruan data, dan pelaporan aset daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan aset berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset daerah, karena setiap data dan perubahan aset dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan secara administratif.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi hasil penelitian empiris sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah (Ashara & Hidayat, 2025; Harfianah & Faisal, 2023; Zamdedy, 2024). Kemudahan akses data dan percepatan proses pelaporan aset yang dihasilkan melalui sistem digital menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan internal dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Meskipun demikian, temuan mengenai kendala implementasi transformasi digital, khususnya terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan adaptasi budaya kerja, mempertegas pandangan (Sarwar et al., 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor nonteknis. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam

mengoperasikan sistem digital serta resistensi terhadap perubahan pola kerja menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut adanya pengelolaan perubahan (*change management*) yang terencana dan berkelanjutan. Tanpa dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi, manfaat transformasi digital berpotensi tidak optimal.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di BKAD Kabupaten Takalar masih berada dalam tahap pengembangan. Digitalisasi telah memberikan dampak positif terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset, namun keberlanjutan dan optimalisasi manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan organisasi secara menyeluruh. Dukungan pimpinan dan kebijakan internal menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi transformasi digital, namun perlu diiringi dengan penguatan komitmen organisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

Dengan demikian, transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah tidak dapat dipahami sebagai proses yang bersifat instan, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara aspek teknologi, sumber daya manusia, organisasi, dan regulasi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan transformasi digital pengelolaan aset pemerintah daerah hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah mampu mengelola perubahan secara komprehensif dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan aparatur, penguatan kebijakan dan regulasi internal, serta peningkatan infrastruktur teknologi agar transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di BKAD Kabupaten Takalar dapat berjalan secara optimal dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Takalar telah mulai diimplementasikan melalui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah. Penerapan sistem berbasis digital tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban administrasi, kualitas data aset, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan.

Transformasi digital memungkinkan proses pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini mendukung efektivitas kerja aparatur serta memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi transformasi digital tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan pola kerja, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, transformasi digital dalam pengelolaan aset pemerintah di BKAD Kabupaten Takalar merupakan proses yang sedang berkembang dan memerlukan penguatan berkelanjutan. Keberhasilan dan keberlanjutan transformasi digital sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparatur, dukungan kebijakan dan komitmen organisasi, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai agar manfaat digitalisasi dapat dioptimalkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashara, S. N., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1488–1502.
- Harfianah, S., & Faisal, F. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2534–2549.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

- Millard, J. (2023). Impact of digital transformation on public governance. *European Union, Luxemburg*.
- Ndoka, M. L. W., De Rozari, P. E., & Kase, P. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Digital Kepemimpinan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 577–587.
- Nur, M. J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). Tata kelola aset barang milik daerah berbasis e-BMD pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766.
- Putri, N., & Muis, A. (2025). Implementasi Sistem Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Berbasis Digital. *Jurnal Pelita Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 135–148.
- Rahmadi, M. H., & Rusmiati, E. T. (2025). Transformasi digital manajemen SDM di instansi pemerintah: adaptasi, tantangan, dan peluang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 7(2), 113–121.
- Sarwar, M. I., Abbas, Q., Alyas, T., Alzahrani, A., Alghamdi, T., & Alsaawy, Y. (2023). Digital transformation of public sector governance with IT service management—A pilot study. *IEEE Access*, 11, 6490–6512.
- Utari, R., & Harahap, J. P. R. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 362–376.
- Zamdedy, Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545–1553.